

## DAFTAR PUSTAKA

### B. BUKU

- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Abdulkadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia
- Mukti Arto (2004) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- R. Subekti. (2007) *Hukum Pembuktian*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Samudera Teguh (1992) *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung. Perpustakaan Nasional RI.
- Sudikno Mertokusumo (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto (1988) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rhineka Cipta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang (1996) *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro (1982) *Hukum Acara Perdata*. Sumur Bandung. Universitas Andalas.

### C. PERATURAN PERUNDANGAN-PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10 /E Dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/E)

### D. JURNAL

Agus, D., & Dewi, L. R. (2021). Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 227-238, DOI: <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1140>

Hakim, L., Alfian, A., & Renovsi, I. J. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri: Studi Penetapan Nomor 58/PDT.

- P/2022/PN. TJK. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 392-404, DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1648>
- Idrus, A. T. N., Dungga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1169-1176, DOI: <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.333>
- Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 122-130, DOI: <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>
- Juanda, E. (2016). Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27-46, DOI: <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>
- Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata. *Private Law*, 1(3), 4512-519, DOI: <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426>
- Nababan, H. (2024). *Panggilan/Pemberitahuan Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat (Analisa Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 644-656, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2018>
- Purwanti, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 59-67, DOI: <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.425>
- Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160>
- Sinuraya, F. A., Ndururu, Y., Nasution, H., Janmanogi, A., & Hasibuan, N. S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 155-172, DOI:  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812426>

#### **E. LAIN-LAIN**

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB

Standart Operasional Prosedur Kepaniteraan Tahun 2022 oleh Direktorat  
Jendral Badan Peradilan Umum

Situs Web Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Diakses melalui link:  
<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8217971/pemerintah-kab-jombang/pencatatan-perubahan-nama-penduduk>

Situs Web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jombang  
Kelas 1B <http://sipp.pn.jombang.go.id>